

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini.(Auditya. 2018).

Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extraordinary*) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan bagi para pejabat pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggungjawab (*akuntability*) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. (waliyati dalam Riantiarno.2018).

Organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas

publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Riantiarno 2018).

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 3 fungsi utama sektor publik: Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum, Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat, Menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. (Riantiarno. 2018).

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk

mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Sihaloho.2018). Sasaran pengukuran kinerja pemerintah adalah keuangan dan non keuangan (BPKP, 2018). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik *good governance* berkenaan dengan: 1) *participation*; 2) *rule of law*; 3) *transparency*; 4) *responsiveness*; 5) *consensus orientation*; 6) *equity*; 7) *effectiveness and efficiency*; 8) *strategy vision*. (Mardiasmo, 2018; UNDP dalam LAN, 2018). Pengukuran kinerja ini dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. (Yuda. 2018). Melaksanakan *good governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri (Mulyawan, 2018). Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah berupaya menerapkan prinsip *good governance*, dengan tujuan agar penataan pemerintahan lebih baik dan negara menjadi lebih baik pula. Penerapan *good governance* mulai

menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan reformasi disegala bidang pada tahun 1997.

Good governance adalah pengolahan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik dimiliki demi kemakmuran masyarakat. (Mardiasmo,2018). Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Ciri-ciri tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu mengikutsertakan semua; Transparan dan bertanggungjawab; Efektif dan adil; Menjamin adanya supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah menurut Wardani (2018) juga menyatakan bahwa penerapan *goodcorporate governance* yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik atau swasta. Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Disamping faktor-faktor di atas, diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja.

Auditya Lucy dan Lismawati (2017) dalam penerapan konsep akuntabilitas kinerja dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut Suryo Pratolo (2017) penerapan akuntabilitas sangat memengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan karena untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan. Menurut (Abdulah, 2017) Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan *good governance*.

Disamping faktor-faktor di atas, diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Soleman (2018) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

pada penelitian terdahulu menurut Damayanti (2017) dan sutirah (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Noviyana dan Pratolo (2018) menemukan hasil bahwa SPIP berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah melalui akuntabilitas publik sebagai variabel *intervening* dan Damayanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan variabel akuntabilitas publik sebagai variabel perantara antara faktor *good governance*, dan sistem pengendalian intern organisasi pemerintah, terhadap kinerja organisasi. penggunaan akuntabilitas sebagai variabel perantara karena akuntabilitas akan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan organisasi. (Halim dan syam,2017). Serta adanya instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan implementasi akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh manulang dan abduh (2019) memiliki banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di antaranya adalah pengendalian intern. Hasil penelitian menemukan bahwa pengendalian intern secara simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi. hal ini menandakan bahwa, semakin baik pengendalian intern semakin baik pengendalian intern yang

dilaksanakan oleh kinerja instansi, maka semakin baik akuntabilitas kinerja yang dihasilkan ini penelitian ini didukung oleh penelitian indriyani dan wahyuni (2017) dan cahyani dan utama (2015). Berbeda dengan Nuraini dan dian (2015) yang mengungkapkan hasil bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Kemala (2011) juga meneliti tentang pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik, hasil penelitiannya mengindikasikan organisasi berhasil dalam mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern. Pemerintah dalam menyusun suatu rencana strategi juga harus memperhatikan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Banyak sekali kasus penyelewengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak sesuai dengan hukum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan. Jika instansi pemerintah tidak membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka bagaimana masyarakat bisa menilai keberhasilan kinerja dari pemerintah. Masyarakat perlu tahu tentang rencana kedepan yang akan dilakukan pemerintah, maka dari itu semua instansi pemerintah diharuskan membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Malaka yakni pengendalian intern dan pemahaman prinsip *good governance* kedua faktor ini mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi karena hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pada capaian Kinerja Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Malaka dipilih sebagai penelitian dengan pertimbangan adanya beberapa instansi pemerintah daerah yang masih belum membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sehingga capaian kinerja instansi Pemerintah secara keseluruhan belum bisa dinilai efektif dan baik oleh masyarakat dan lembaga lebih tinggi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malaka. Berdasarkan alasan diatas penelitian ini ingin menguji tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah” dengan mengambil lokasi penelitian pada Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan (Bp4d) Kabupaten Malaka.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.1 Persoalan Penelitian

1. Apakah pemahaman prinsip *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BP4D Kabupaten Malaka?
2. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BP4D Kabupaten Malaka?

4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman prinsip *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BP4D Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BP4D Kabupaten Malaka.

5.1 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga Universitas Kristen Artha Wacana khususnya Fakultas Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan membantu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pada Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Malaka.